

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman, setiap institusi diwajibkan mampu mengendalikan segala sesuatu baik dalam mengelola operasional maupun dalam memecahkan masalah yang muncul dalam setiap aktivitasnya. Setiap institusi dituntut untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang dimilikinya secara optimal agar dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kegiatan operasional guna mempertahankan kelangsungan hidup dan menghadapi hambatan dan tantangan yang ada.

Untuk dapat mempertahankan keberadaannya setiap institusi harus menyusun manajemen yang baik. Sebagian besar kegagalan dalam mencapai tujuannya biasanya disebabkan karena suatu institusi tersebut tidak konsisten dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Ditambah lagi dengan kurangnya tenaga profesional di dalam institusi tersebut. Hal ini menuntut adanya efektivitas didalam menjalankan kegiatan operasional.

Dalam setiap kegiatan operasional pada institusi, kas menjadi komponen yang paling penting karena hampir setiap transaksi yang dilakukan menggunakan kas. Menurut Putu Astri Lestari (2020:1) Kas adalah segala sesuatu baik yang berbentuk uang atau bukan yang dapat tersedia dengan segera dan diterima sebagai alat pelunasan kewajiban pada nilai nominalnya. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 207 Laporan Arus Kas Revisi 1 Januari 2024, yang dimaksud dengan setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, yang dengan cepat dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Kas terdiri atas saldo kas dan rekening giro.

Pengeluaran kas merupakan kegiatan yang penting untuk melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Salah satu faktor yang menyebabkan pengeluaran kas ini penting yaitu terjadinya perubahan kas pada setiap



pengeluaran kas yang meliputi transaksi berkurangnya saldo kas tunai dan rekening bank milik Pemerintah Daerah.

Dalam kegiatan pengeluaran kas memiliki beberapa ancaman atau masalah, seperti kesalahan pembayaran yang dapat terjadi berupa salah dalam memberikan atau membayarkan nominal uang tunai, kesalahan pembayaran untuk barang yang tidak diterima sebelumnya, *double* pembayaran akibat pencatatan yang salah dan dokumentasi pendukung yang kurang valid. Sementara itu ancaman dalam bentuk lain berupa pencurian kas, meskipun tingkat keterjadiannya rendah namun cukup menjadi ancaman di dalam aktivitas ini.

Untuk mengatasi masalah dalam siklus pengeluaran kas pada institusi pemerintah maka dibutuhkan pengendalian internal sebagai upaya meminimalisir masalah atau ancaman yang akan terjadi pada proses pengeluaran kas. Menurut Mulyadi (2017:129), pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang di koordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menurut Permendagri Nomor 109 Tahun 2017 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketertarikan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam penerapan sistem pengendalian internal atas kas pada institusi pemerintah, auditor internal dituntut untuk membantu manajemen dalam meningkatkan efektivitas penerapan pengendalian internal atas pengeluaran kas yang dilakukan. Dimana dalam meningkatkan penerapan pengendalian internal pada proses atau siklus pengeluaran kas dapat memperkecil tingkat kecurangan yang nanti nya dapat menimbulkan kerugian.

Kas memiliki sifat mudah diabaikan (*misappropriate*) daripada aset lain, seperti persediaan atau peralatan. Oleh karena itu menjaga kas dan membentuk sistem pengendalian internal terhadap kas merupakan perhatian yang paling penting untuk perusahaan (Soemarso, 2010:11). Hal ini dipertegas dengan fungsi Sistem

Pengendalian Internal menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) yaitu efektifitas dan efisiensi operasional, penjagaan aset dan tujuan pelaporan keuangan.

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi mempunyai tugas pokok untuk membantu urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (sektor sumber daya air dan sektor bina konstruksi) yang menajafi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk memilih judul **“EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PROSEDUR PENGELUARAN KAS TERHADAP BELANJA KEGIATAN PADA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI SUMATERA BARAT”**

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang dapat penulis rumuskan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengeluaran kas terhadap belanja kegiatan pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana penerapan pengendalian internal pada prosedur pengeluaran kas terhadap belanja kegiatan pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dalam laporan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengeluaran kas terhadap belanja kegiatan pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat?



2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pengendalian internal pada prosedur pengeluaran kas terhadap belanja kegiatan pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat?

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini bagi penulis, instansi, dan universitas adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Manfaat yang penulis dapatkan yaitu:

1. Sebagai sarana dalam menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan.
2. Mendapatkan gambaran dan pengalaman di dunia kerja yang sesungguhnya dari kegiatan magang selama 40 hari kerja.
3. Penulis dapat mengetahui gambaran bagaimana prosedur pengeluaran kas terhadap belanja kegiatan yang digunakan, untuk mengetahui efektivitas penerapan pengendalian internal.
4. Sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas

b. Bagi Instansi

Manfaat bagi instansi yaitu

1. Hasil laporan dapat menjadi saran dan masukan untuk kedepannya sehingga kinerja instansi menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
2. Dengan adanya mahasiswa/mahasiswi magang dapat membantu aktivitas kerja pada Dinas Sumber daya Air dan Bina Konstruksi Prvinsi Sumatera Barat.
3. Dapat memberikan kontribusi positif terhadap sistem pengendalian internal proses pengeluaran kas terhadap belanja kegiatan pada instansi.

c. Bagi Pembaca

Manfaat bagi pembaca yaitu dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan informasi tentang efektivitas sistem pengendalian internal atas prosedur pengeluaran kas.



## 1.5 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini akan dilaksanakan pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman No.106, Ulak Karang Utara, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Kegiatan ini berlangsung selama 40 hari kerja.

## 1.6 Sistematika Penulisan

### BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat kegiatan magang, tempat dan waktu magang serta sistematika penulisan

### BAB II : Landasan Teori

Bab ini berisikan tentang penjelasan pada landasan teori yang menjadi pembahasan penulis dalam penyelesaian tugas akhir.

### BAB III : Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini membahas tentang gambaran umum Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari sejarah, visi dan misi, struktur dan uraian tugas pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat.

### BAB IV : Pembahasan

Bab ini membahas masalah yang diangkat, mengenai prosedur pengeluaran kas terhadap belanja kegiatan untuk meningkatkan penerapan efektivitas pengendalian internal pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat.

### BAB V : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan demi kelangsungan aktivitas perusahaan dan juga bermanfaat untuk pembaca yang akan melaksanakan magang atau praktek kerja.



